

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akademisi berperan penting dalam kolaborasi *penta helix* pencegahan kekerasan anak di Surabaya. Fakultas Psikologi Untag Surabaya, melalui kerja sama resmi dengan DP3APPKB sejak 2023, berkontribusi tidak hanya lewat edukasi dan sosialisasi seperti SOTH dan webinar parenting PUSPAGA, tetapi juga melalui riset, pendampingan, serta pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Kekuatan peran akademisi terletak pada legalitas kerja sama, pemanfaatan hasil penelitian, serta partisipasi aktif civitas akademika. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterlibatan yang masih terbatas pada satu fakultas dan kesinambungan program. Dengan demikian, akademisi menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
- b. Sektor bisnis, dalam hal ini PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto, berkontribusi nyata dalam kolaborasi *penta helix* pencegahan kekerasan anak melalui dukungan permodalan dan juga CSR bagi keluarga rentan, seperti pemberian rombongan usaha, peralatan sekolah, kebutuhan pokok, dan sarana rumah tangga. Bantuan ini disalurkan melalui kerja sama dengan DP3APPKB agar tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak dari keluarga eks kolong jembatan Kampung 1001 Malam. Keterlibatan ini penting karena kondisi ekonomi keluarga yang rapuh sering menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Peran Jasa Marga juga relevan

secara geografis, mengingat lokasi sasaran berada di bawah tol yang dikelolanya. Dibandingkan dengan penelitian di daerah lain, pola kontribusi bisnis di Surabaya menonjol karena lebih menekankan keterlibatan praktis melalui penyaluran bantuan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat rentan. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor bisnis tidak sekadar menjalankan program CSR secara seremonial, tetapi hadir sebagai mitra aktif pemerintah dalam menciptakan solusi sosial yang langsung menyasar akar permasalahan, termasuk kerentanan ekonomi keluarga yang berpotensi memicu kekerasan terhadap anak.

c. Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB memegang peran sentral dalam kolaborasi *penta helix* pencegahan kekerasan anak. Peran ini dijalankan melalui regulasi, terutama Perwali No. 62 Tahun 2024, serta program langsung seperti Puspaga dan Sosialisasi Dinamika Remaja. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai pelaksana program sekaligus koordinator yang menghubungkan akademisi, bisnis, masyarakat, dan media. Mekanisme koordinasi dilakukan baik secara formal (MoU, surat, proposal) maupun informal (diskusi tatap muka, media sosial), sehingga program lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan. Namun, pola kolaborasi yang dibangun masih terbatas, sering kali hanya melibatkan dua atau tiga aktor, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kolaborasi *penta helix* yang utuh. Dengan demikian, pemerintah telah berperan ganda sebagai *regulator dan coordinator*, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. Masyarakat, khususnya melalui Forum Anak Surabaya (FAS), berkontribusi

nyata dalam kolaborasi *penta helix* pencegahan kekerasan anak. FAS tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam menyuarakan hak anak melalui kegiatan seperti FAS Talk, kampanye Stop Kekerasan dan Perkawinan Anak, serta partisipasi dalam Suara Anak Indonesia (SAI). Peran ini memperkuat kesadaran sebaya dan memperluas jangkauan program perlindungan anak ke masyarakat. Kekuatan FAS terletak pada partisipasi langsung anak-anak dan remaja yang direkrut secara selektif, sesuai amanat regulasi. Namun, keterlibatan masyarakat masih lebih dominan pada aspek kampanye dan edukasi, sehingga dampaknya lebih pada peningkatan kesadaran dibandingkan penanganan secara menyeluruh. Dengan demikian, kontribusi masyarakat di Surabaya telah relevan dengan kerangka *penta helix*, tetapi masih perlu diperluas agar lebih inklusif, melibatkan berbagai komunitas, dan berkelanjutan dalam mendukung sistem perlindungan anak di tingkat kota.

e. Media, khususnya Suara Surabaya, berperan signifikan dalam kolaborasi *penta helix* pencegahan kekerasan anak di Surabaya. Melalui website, media sosial, dan talkshow interaktif seperti Semanggi Suroboyo, media tidak hanya menyebarkan informasi mengenai program dan kebijakan DP3APPKB secara cepat dan luas, tetapi juga menyediakan ruang umpan balik publik melalui komentar, kritik, maupun diskusi. Dengan begitu, media berfungsi ganda sebagai agen komunikasi dan agen partisipasi, yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam isu perlindungan anak.

Kekuatan media terletak pada jangkauan luas, kecepatan penyebaran pesan, serta kemampuan menciptakan ruang dialog partisipatif. Namun, kolaborasi yang ada

masih bersifat administratif melalui surat resmi sehingga kesinambungan kerja sama berpotensi terbatas. Selain itu, keterbatasan juga muncul karena akses informasi lebih dominan bagi masyarakat yang aktif di media digital serta risiko bias komentar publik. Dengan demikian, peran media dalam kolaborasi *penta helix* terbukti strategis, terutama sebagai penyampai informasi dan penyedia ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan kekerasan anak

Dengan demikian, kolaborasi model *penta helix* dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Surabaya telah berkontribusi dan disesuaikan dengan program dan peran masing - masing aktor. Sinergi antaraktor ini telah memberikan dampak positif terhadap upaya penguatan keluarga sebagai langkah preventif dalam mencegah kekerasan anak, meskipun kesinambungan atau keberlanjutan program, koordinasi lintas sektor, dan kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar kolaborasi *Penta helix* berjalan lebih terintegrasi, serta memperluas kerja sama dengan lebih banyak pihak sehingga pelaksanaan program pencegahan kekerasan anak berlangsung lebih inklusif dan optimal. Selain itu, setiap aktor perlu menjamin keberlanjutan program setelah perjanjian kerja sama berakhir agar potensi kekerasan tidak berulang.

- b. Sektor bisnis diharapkan tidak hanya berfokus pada bantuan material sesaat, tetapi lebih diarahkan pada program berkelanjutan yang mendukung pencegahan kekerasan anak. Selain itu, sektor bisnis perlu menjalin kemitraan formal dengan pemerintah dan aktor lain agar kontribusi yang diberikan selaras dengan kebutuhan lapangan serta memiliki dampak jangka panjang.
- c. Media diharapkan tidak hanya berperan dalam menyebarluaskan informasi, tetapi juga membangun kerja sama yang lebih strategis. Selama ini pola kemitraan dengan media seringkali hanya terjalin melalui surat resmi untuk publikasi kegiatan, sehingga sifatnya masih bersifat administratif dan terbatas. Ke depan, kerja sama tersebut perlu ditingkatkan menjadi bentuk kolaborasi yang lebih substansial, misalnya melalui kesepakatan jangka panjang dalam penyediaan ruang edukasi publik, atau produksi konten berkelanjutan serta kampanye tentang perlindungan anak. Dengan demikian, media dapat berperan lebih aktif sebagai mitra strategis dalam pencegahan kekerasan anak, bukan sekadar pelengkap acara atau publikasi sesaat.